PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TAKDIR**
2. Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH**
3. NHK : **141118**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 371 m2/60 m2 di KAB / KOTA MAROS, Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/48 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 523 m2/160 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/112 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 2 m2/2 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 242.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**445.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**533.786.428**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**2.570.786.428**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**2.570.786.428**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.